

## **PJ. GUBERNUR SULTRA RESMI BUKA RAKORWASDA TAHUN 2024, TEKANKAN PENTINGNYA SINERGI PENGAWASAN DAERAH KAB/KOTA SE-SULTRA**



Sumber gambar:

<https://sultraprov.go.id/berita/detail/pj-gubernur-sultra-resmi-buka-rakorwasda-tahun-2024tekankan-pentingnya-sinerji-pengawasan-daerah-kabkota-se-sultra>

### **Isi Berita:**

Kendari (PPID Utama Sultra), Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen POL (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari pada 12 November 2024. Kegiatan yang mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara” ini bertujuan memperkuat sinergi pengawasan terhadap program pembangunan daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sultra, Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Irwasda Polda Sultra, Kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sultra, serta Inspektur Daerah Kabupaten/Kota. Narasumber dalam acara ini meliputi perwakilan dari Itjen Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Aspidsus Kejati Sultra, dan Kasubdit Tipikor Polda Sultra.

Dalam laporannya, Ketua Panitia, Ruswanty, SE., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini berlandaskan pada beberapa regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2017, serta Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih dalam pengawasan oleh APIP, menyamakan persepsi peran APIP, serta meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan peta pengawasan tahun 2025 oleh Inspektur Daerah di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan beberapa poin utama sebagai tindak lanjut Rakornas bersama Presiden pada 7 November 2024. Beliau menegaskan bahwa program Pemprov Sultra harus selaras dengan visi-misi Presiden dan program prioritas nasional. Pj. Gubernur juga menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani masyarakat, termasuk dalam hal penghematan penggunaan APBN/APBD serta pembatasan perjalanan dinas. Lebih lanjut, APIP diimbau untuk terus menegakkan integritas dan menjauhi praktik korupsi.

Ada tujuh fokus utama dalam pengawasan yang ditekankan oleh Pj. Gubernur. Pertama, APIP harus mampu mengantisipasi berbagai penyimpangan (fraud). Kedua, menerapkan sistem deteksi dini untuk mencegah penyimpangan. Ketiga, menjaga integritas APIP sebagai quality assurance. Keempat, tidak memberi ruang bagi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kelima, meningkatkan indeks integritas. Keenam, melakukan pengawasan ketat terhadap pelayanan publik dan keuangan. Ketujuh, inovasi dalam menghadapi tantangan serta peningkatan etika pegawai.

Pendekatan pengawasan dalam RAKORWASDA kali ini menggunakan model 4-CO, yang terdiri dari peran konsultatif (Consultative Role), kepatuhan (Compliance Role), koordinasi (Coordination Role), dan korektif (Corrective Role).

Dalam tata kelola pemerintahan, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, Pj. Gubernur juga menekankan beberapa prinsip yang harus dijalankan, yakni kepastian hukum yang mengedepankan dasar hukum, kepatutan, dan keadilan; kemanfaatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan pemerintah; serta prinsip ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, keseimbangan, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

Pj. Gubernur juga mengarahkan APIP untuk berfokus pada tugas audit, reviu, evaluasi, pembinaan pengawasan, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut temuan. Untuk mencapai hasil maksimal, diperlukan pula terobosan kreatif dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini, ada lima aspek kinerja yang menjadi target utama, yaitu Indeks Integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, penyelesaian pelanggaran kode etik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultraprov.go.id/berita/detail/pj-gubernur-sultra-resmi-buka-rakorwasda-tahun-2024tekanan-pentingnya-sinergi-pengawasan-daerah-kabkota-se-sultra>, “Pj. Gubernur Sultra Resmi Buka Rakorwasda Tahun 2024, Tekankan Pentingnya Sinergi Pengawasan Daerah Kab/Kota se-Sultra”, tanggal 12 November 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1114719/hadiri-rakor-pengawasan-daerah-2024-pj-gubernur-sultra-ingatkan-pemerintahan-bersih>, “Hadiri Rakor Pengawasan Daerah

2024, Pj. Gubernur Sultra Ingatkan Pemerintahan Bersih”, tanggal 12 November 2024.

**Catatan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada:
  1. Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
    - a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
    - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
    - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
    - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
    - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada:
  1. Pasal 280 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah;
  2. Pasal 280 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
    - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
    - c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.